



Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	2024	Hal.: 9																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

## PEMERINTAHAN

### Sinergitas Perda

**PEJABAT** Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Mohammad Bari, menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam pertemuan bersama para anggota DPRD terpilih, Mohammad Bari menekankan bahwa masih banyak celah dan potensi yang belum tergarap sebagai sumber pendapatan daerah.



Mohammad Bari

◆ Ke Halaman 15 kolom 5

Sambungan dari halaman 9

“Bapak ibu sekalian, begitu banyak celah dan potensi pendapatan bagi setiap daerah yang saat ini masih belum tersentuh,” kata Bari saat membuka secara resmi Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya masa jabatan 2024-2029 di Pontianak, Senin (4/11).

Bari menambahkan bahwa pada tahun 2025 mendatang, akan ada perubahan dalam pembagian hasil pajak daerah: sebanyak 66 persen akan dikembalikan ke kabupaten/kota, sementara 34 persen akan menjadi bagian provinsi.

Lanjut Bari, sebagai mitra yang sejajar dengan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, anggota DPRD tentu memiliki peran dan tanggung jawab yang sama guna mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan melalui tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sejalan dengan hal tersebut, maka kegiatan orientasi yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya dan Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah

dengan difasilitasi oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, saya nilai sangat penting guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku serta pemahaman tentang tugas, wewenang dan fungsi anggota DPRD,” imbuhnya.

Dijelaskannya, keseluruhan Fungsi DPRD tersebut dapat terwujud dengan optimal apabila setiap anggota DPRD didukung dengan kompetensi yang memadai dengan memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD.

Saat ini pengembangan kompetensi bukan hanya diwajibkan kepada seluruh ASN semata, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, tetapi anggota DPRD juga mempunyai hak yang sama untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui kegiatan orientasi dan pendalaman tugas.

“Dengan pemahaman dan pengetahuan yang akan Bapak/Ibu miliki selama mengikuti Orientasi, Saya berharap akan tercapai sinergitas, kerjasama dan kolaborasi antara Kepala Daerah dengan Anggota DPRD dalam menyusun, merencanakan dan menyukseskan pelaksanaan Program-Program Pemerintah baik Pro-

gram Nasional, Program Provinsi maupun Program di masing-masing Kabupaten,” jelasnya.

Lanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara saat ini tidak dapat dianggap enteng karena masalah-masalah yang terjadi, terkait dengan perubahan iklim, masalah pangan, masalah kemiskinan harus menjadi prioritas serta perhatian kita bersama untuk diatasi.

Menurutnya, diperlukan kerja sama dan kolaborasi antara Kepala Daerah dengan anggota DPRD serta pihak-pihak terkait lainnya dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi di daerah masing-masing.

“Oleh karena itu, tanpa adanya sinergi, kerjasama dan kolaborasi antara Kepala Daerah dengan anggota DPRD, saya khawatir tujuan dari Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sulit untuk diwujudkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu Bari juga menitip pesan kepada para peserta yang mengikuti masa orientasi ini, untuk mampu memahami betul fungsi sebagai hami dan legislasi.

“Yang mana lembaga Saudara jalankan harus mampu membentuk suatu Perda yang pada akhirnya dapat membawa kemaslahatan di masyarakat,” pungkasnya. (mse)